

DALAM EDISI BULAN INI

- 01 Keterlibatan FORCLIME dalam upaya REDD+
- 02 FORCLIME siap dukung Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua implementasikan kegiatan REDD+
- 03 FORCLIME dukung Taman Nasional Wasur susun RPJP Periode 2021–2030: Kontribusi untuk implementasi kegiatan REDD+ Papua
- 04 FORCLIME dan KPHP Sorong Selatan koordinasikan rencana kerja bersama
- 05 FORCLIME berkoordinasi dengan Yayasan Wasur Lestari identifikasi kampung percontohan di sekitar Taman Nasional Wasur, Papua

Pemandangan Hutan Papua.
Foto: Ricky Martin

Editorial

REDD+ **belum** mati! Beberapa bulan terakhir ini terlihat maraknya kegiatan di tingkat nasional maupun internasional terkait mitigasi perubahan iklim di sektor kehutanan atau dengan kata lain REDD+. Ada yang mengejutkan, seperti pembatalan LoI dengan Norwegia namun ada juga yang menjanjikan, seperti pembayaran pertama FCPF di Mozambik, Afrika, pembayaran berbasis kinerja GCF dan kelanjutan proses FCPF di Kalimantan Timur.

Jelas bahwa dengan perubahan iklim menjadi nyata bagi semua orang, baik itu melalui banjir di Puttussibau atau bencana banjir di Lembah Ahr di Jerman, taruhannya semakin tinggi untuk melakukan sesuatu tentang perubahan iklim, dan sektor kehutanan dipandang sebagai satu “solusi berbasis alam” untuk mencapai hal ini. Sekarang, sebelum COP 26 UNFCCC di Glasgow, kita dapat berasumsi bahwa skema baru akan muncul dan ada peningkatan gairah untuk kredit karbon dan kerja sama internasional dalam mitigasi perubahan iklim di sektor kehutanan.

Namun, pertanyaan lama tetap ada, diantaranya prakiraan pendanaan, penetapan harga karbon, serta mekanisme dan skala pendanaan. Selain itu, pertanyaan yang sangat teknis, seperti kesepakatan penggunaan metodologi pengukuran dan pemantauan kinerja REDD+, *nesting* dan pelibatan sektor swasta. Oleh karena itu, saat ini merupakan saat yang tepat untuk mengevaluasi dan melanjutkan kembali diskusi REDD+. Seperti yang dinyatakan oleh bapak Kuntoro Mangkusubroto mantan kepala badan REDD+ dalam pidatonya di COP Warsawa pada tahun 2013 “REDD+ selalu dirancang sebagai lalu lintas dan komunikasi dua arah antara negara maju dan negara berhutan”. Jadi sekarang saatnya untuk mendefinisikan kembali “lalu lintas dua arah” ini menjadi kerja sama yang konstruktif dan nyata. Namun dalam pelaksanaannya, perlu menjadi catatan bahwa proses negosiasi atau negosiasi ulang diperlukan pemahaman posisi dan kepercayaan masing-masing. Hal ini adalah faktor

yang menghambat dalam setahun terakhir ini karena adanya pandemi Covid-19. Kita semua telah duduk terlalu lama di kotak kita, sekarang berharap untuk “New Normal” di mana hubungan dapat diperbaiki dengan kesadaran bahwa terkait dengan perubahan iklim kita semua duduk dalam satu perahu dan membangun dialog yang konstruktif dan saling menguntungkan (*win - win solution*) harus dilakukan.

GIZ telah mendukung REDD+ di Indonesia sejak awal, selama COP di Bali 2007 dan mengamati transformasi dari harapan besar untuk pasar karbon internasional, menjadi lebih fokus pada aksi perubahan iklim domestik dan memenuhi target NDC. Namun kami masih percaya pada konsep sederhana secara keseluruhan, bahwa akan ada yang membayar untuk pohon yang dibiarkan tumbuh di hutan dan tidak menebangnya.

Dalam edisi kali ini menyoroti kegiatan FORCLIME terkait REDD+ yang baru-baru ini dilaksanakan, yang menunjukkan kemajuan (walaupun) lambat dalam memfasilitasi pendanaan iklim melalui GCF untuk mitra lama kami, provinsi Kalimantan Barat. Tetapi juga menunjukkan inisiatif baru dari Papua dan Sulawesi Tengah yang relevan untuk REDD+. Kegiatan-kegiatan ini, semua dilakukan bersama dengan otoritas lokal yang relevan, menunjukkan bagaimana “cara FORCLIME melakukan sesuatu”, berpikir jangka panjang, bekerja berdasarkan permintaan dan memiliki hubungan yang saling percaya dengan mitra.



Georg Buchholz
Direktur Program
FORCLIME

Keterlibatan FORCLIME dalam upaya REDD+

Wandojo Siswanto, Manajer bidang strategis, kebijakan kehutanan dan perubahan iklim



Pemerintah Federal Republik Jerman telah sejak lama mendukung Pemerintah Republik Indonesia untuk menangani perubahan iklim, khususnya yang berkaitan upaya mitigasi di bidang kehutanan. Dalam COP 13 di Bali tahun 2007, telah disepakati upaya penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, yaitu dengan membuat *Demonstration Activities* untuk mendemonstrasikan dan mengetahui secara lebih terukur penurunan emisi dimaksud. Dalam persiapannya, Pemerintah Federal Republik Jerman terlibat secara intensif dalam pembentukan IFCA (*Indonesia Forest Climate Alliance*) yang melibatkan tiga pilar utama pemerintahan (*government, private sector, civil society including academicians*) serta mitra internasional. Studi pada tahun 2007 tersebut merekomendasikan sebagai berikut:

1. Membangun kerangka awal yang dirancang oleh IFCA (*build on initial framework designed by IFCA*),
2. Melanjutkan konsultasi dan analisis teknis (*continue consultations and technical analysis*),
3. Mencoba dan menerapkan pilot/demonstration activities pada berbagai kondisi (*test and implement pilot/demonstration activities with heterogeneous conditions*),
4. Melaksanakan pembangunan kapasitas pada semua tingkatan (*conduct capacity building at all levels*),
5. Membuat kerangka nasional yang andal untuk penurunan emisi yang dapat diverifikasi (*create credible national framework for verifiable emission reduction*), dan
6. Menyampaikan penurunan nyata emisi GRK (*deliver real reductions in GHG emissions*).

Sesuai kesepakatan COP-13 di Bali pada tahun 2007, diputuskan pendekatan untuk mempromosikan upaya penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD) di negara-negara berkembang (Dec.2.CP. 13) serta mempertimbangkan peran konservasi, pengelolaan secara lestari dari berbagai jenis hutan (SFM) dan peningkatan stok karbon yang menjadi bagian dari *Bali Action Plan* (Dec.1/CP.13). Sejalan dengan

keputusan tersebut, Pemerintah Republik Federasi Jerman dan Pemerintah Republik Indonesia bersepakat untuk membangun kerja sama yang diimplementasikan dalam Program FORCLIME dengan menggunakan dua pendekatan kerja sama, yaitu kerja sama teknis (diimplementasikan oleh GIZ) dan bantuan finansial (disalurkan melalui KfW) yang dimulai pada tahun 2009.

Sejak itu, FORCLIME terus berkembang sebagai program kerja sama yang juga mendukung penerapan pemerintahan yang baik di bidang kehutanan (*good forestry governance*). Wilayah kerja FORCLIME semula berada di tiga provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, kemudian ditambah dengan dukungan terhadap upaya konservasi keanekaragaman hayati, termasuk pemberdayaan masyarakat di wilayah Cagar Biosfer Lore Lindu. Dimulai pada tahun 2021, wilayah kerja FORCLIME, khususnya kerja sama teknis beralih ke wilayah Timur Indonesia, yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan tetap melanjutkan dukungan terhadap upaya pelestarian di Cagar Biosfer Lore Lindu di Sulawesi Tengah.

Tujuan Program Kerja Sama FORCLIME

Tujuan menyeluruh program ini adalah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari bidang kehutanan seraya meningkatkan mata pencaharian masyarakat desa miskin Indonesia. Dalam rangka mencapai sasaran ini, Tim Program mendukung Pemerintah Indonesia merancang dan mengimplementasikan reformasi kebijakan dan kelembagaan untuk pelestarian dan pengelolaan hutan yang lestari, pada tingkat lokal, provinsi dan nasional. Dukungan program FORCLIME, diantaranya implementasi mekanisme kebijakan kehutanan internasional di tingkat lokal, termasuk REDD+ di bawah Konvensi Kerangka Perubahan Iklim dan Mekanisme Pembagian Akses dan Manfaat (*Access and Benefit Sharing Mechanism/ABS*) yang ditetapkan di bawah Konvensi Keanekaragaman Hayati adalah fitur penting dari program, dan menghasilkan pembuat keputusan dengan pengalaman tentang bagaimana konsep internasional dapat diimplementasikan di lapangan.



Fasilitasi FORCLIME

Kerja sama teknis antar pemerintah yang diimplementasikan oleh GIZ dalam program FORCLIME bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, secara garis besar menyangkut:

Fasilitasi FORCLIME

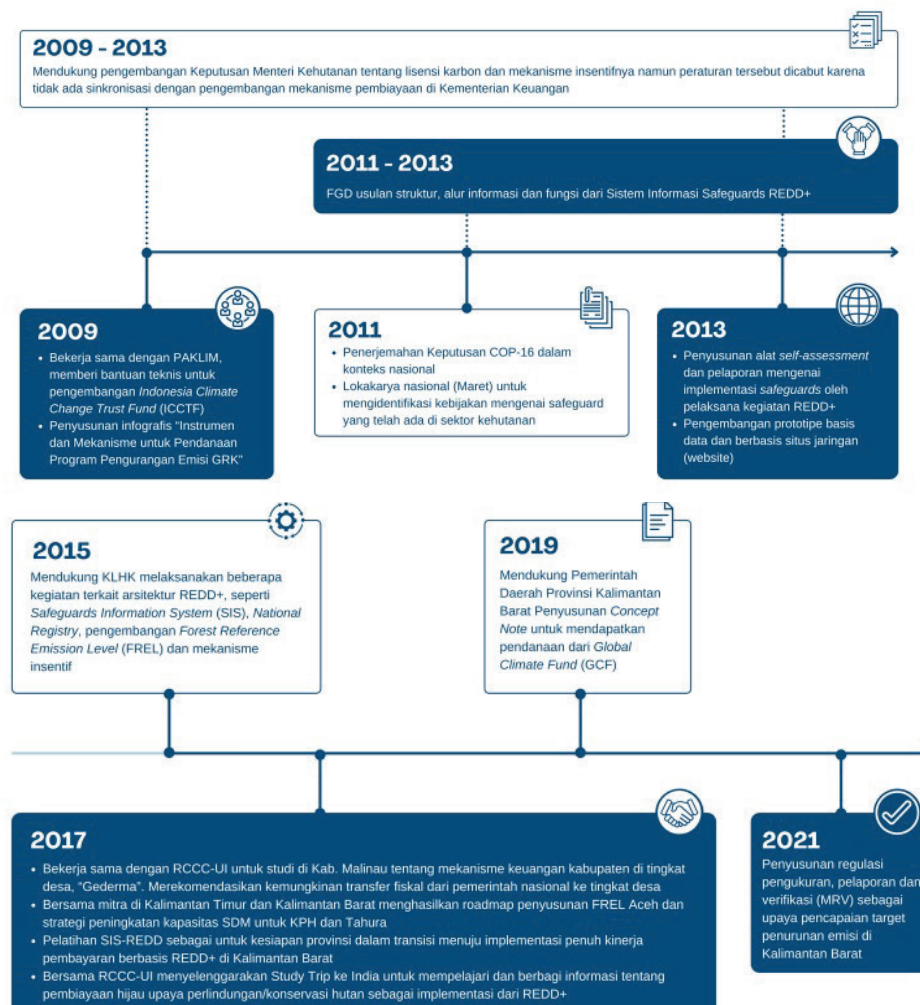
- Saran pengembangan strategi atas pengelolaan hutan dan REDD+ di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten
- Saran teknis terkait dengan kerangka kerja pelaksanaan REDD+ di berbagai tingkatan, termasuk mekanisme finansial iklim
- Mendukung proses reformasi administrasi kehutanan seperti pembentukan unit-unit pengelolaan hutan dan skema-skema hutan masyarakat
- Mendukung konservasi alam dan Mekanisme Pembagian Akses dan Manfaat (*Access and Benefit Sharing Mechanism/ABS*)
- Mendukung pengembangan skema pembayaran jasa lingkungan untuk mendukung mata pencaharian lestari di pedesaan
- Mendukung pemasaran dan penggunaan lestari hasil hutan bukan kayu oleh masyarakat lokal dan mendukung langkah-langkah kebijakan yang bertujuan bagi bioekonomi berbasis hutan, termasuk kerja sama dengan universitas lokal
- Membangun kapasitas untuk pengelolaan hutan lestari dan konservasi alam

Kegiatan Terkait Mitigasi Perubahan Iklim

Sebelum pembentukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, FORCLIME telah mendukung (saat itu masih)

Departemen Kehutanan dalam pengembangan kebijakan mengenai perubahan iklim. Secara spesifik, tujuannya adalah untuk meningkatkan setidaknya dua elemen arsitektur REDD+ (yaitu MRV, safeguards, dan mekanisme pembagian manfaat) di tingkat nasional dan sub-nasional dalam koordinasi dengan lembaga terkait.

Salah satu upaya yang hingga kini berlangsung untuk membuktikan bahwa REDD+ masih merupakan pendekatan yang realistis adalah mendukung Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat melalui Pokja REDD+ Provinsi menyusun *concept note* untuk mendapatkan pendanaan dari *Global Climate Fund* (GCF). *Concept note* ini berjudul “Memperkuat aksi mitigasi provinsi untuk mendukung target perubahan iklim nasional dan pendekatan yurisdiksi dalam REDD+” (*To strengthen the provincial mitigation action to support national climate change target and a jurisdictional approach in REDD+*). Terkait dengan upaya tersebut, FORCLIME mendukung penyusunan regulasi tentang pengukuran, pelaporan dan verifikasi (MRV). Penyusunan regulasi ini dimaksudkan untuk mendukung upaya pencapaian target penurunan emisi di Kalimantan Barat sebagai bagian dari upaya pencapaian target penurunan emisi yang ditetapkan dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC). Selain itu, regulasi yang dipersiapkan ini akan digunakan sebagai pedoman bagi Pokja REDD+ Provinsi untuk melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan terkait REDD yang dilaksanakan oleh berbagai pemangku kepentingan.





Pokja REDD+ Kalimantan Barat susun strategi intervensi penurunan emisi (2019)

Penyusunan *concept note* tersebut didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh Pokja REDD+ dalam mengawal isu perubahan iklim di Provinsi Kalimantan Barat serta dokumen-dokumen strategis yang dimiliki, seperti Tingkat Emisi Rujukan Sektor Kehutanan dan Sektor Berbasis Lahan yang telah disinkronisasikan dengan Tingkat Emisi di Tingkat Nasional (*Forest Reference Emission Level /FREL*), Strategi Rencana Aksi Penurunan Emisi (SRAP), Petunjuk Teknis Pengukuran Karbon, Pemantauan Emisi GRK dari Deforestasi dan Degradasi Hutan Periode 2013-2016, Strategi Intervensi Penurunan Emisi (SIPE) serta beberapa dokumen pendukung lainnya. Untuk memperkuat entitas pengusul, Pokja REDD+ Provinsi Kalimantan Barat melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Inisiatif Dagang Hijau (IDH) dan Fauna Flora Internasional (FFI) sebagai bagian dari kelompok pengusul. Kedua lembaga ini selain sebagai anggota Pokja REDD+ juga diharapkan berbagi pembelajaran dan pengalaman dalam implementasi penurunan emisi sesuai dengan bidangnya dalam proses pendampingan dan kerja sama dengan sektor

swasta dan fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan skema perhutanan sosial serta konservasi sumberdaya alam.

Concept note yang telah disampaikan masih dalam proses oleh Sekretariat GCF untuk selanjutnya dibahas dalam Sidang Komite Investasi Perubahan Iklim (CIC) sebagai dasar persetujuan ke tahap berikutnya, yaitu penyusunan proposal pembiayaan penuh yang didahului dengan pelaksanaan kajian/studi kelayakan serta persiapan implementasi pelaksanaan proyek yang diusulkan.

Terkait dengan REDD+ dalam pelaksanaan program FORCLIME 4.0, dukungan terhadap proses penyusunan proposal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mendapatkan pendanaan dari GCF (*Green Climate Fund*) akan terus dilanjutkan. Pendanaan untuk pelaksanaan REDD+ berbasis yurisdiksi merupakan inisiatif baru yang dapat direplikasi bagi provinsi lainnya. Semoga FORCLIME akan tetap dapat memberikan dukungan dan berkontribusi dalam menerapkan Tata Kelola Kehutanan yang lebih baik.



Pokja REDD+ Kalimantan Barat selaraskan tingkat acuan emisi hutan (FREL) provinsi (2018)



Pelatihan tentang perubahan iklim dan REDD+ bagi Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) (2016)

FORCLIME siap dukung Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua implementasikan kegiatan REDD+



Dalam rangka implementasi kegiatan REDD+, Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) mengadakan lokakarya Penyusunan Pelaporan Penurunan Emisi Provinsi Papua pada 14–15 September 2021. Pertemuan tersebut dihadiri oleh berbagai instansi/organisasi pemerintah daerah sektor kehutanan dan lahan, Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), perguruan tinggi dan mitra pembangunan kehutanan Provinsi Papua. DKLH Provinsi Papua mengemukakan kebijakan DKLH dalam pelaksanaan kegiatan REDD+ telah dituangkan di dalam sasaran jangka menengah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bahwa penanganan laju deforestasi sampai pada tahun 2023 adalah 25 ribu hektare/tahun, dengan intensitas penurunan emisi gas rumah kaca (emisi karbon) pada tahun 2023 mencapai 63,16 ribu ton CO₂. Pemerintah daerah telah membentuk Pokja Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan di Provinsi Papua melalui Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/80/Tahun 2021. Selain itu, pemerintah daerah telah menetapkan prioritas pelaksanaan REDD+ terkait sektor kehutanan yang dituangkan dalam Dokumen Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) Papua tahun 2013; dan Dokumen Rencana Aksi Daerah Penurunan Gas Emisi Rumah Kaca (RAD GRK) Provinsi Papua tahun 2015; dan transformasi RAD GRK menuju

Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) Provinsi Papua tahun 2017.

Dalam lokakarya tersebut, FORCLIME diundang dan memaparkan dukungan yang akan diberikan terkait dengan pelaksanaan REDD+ melalui program kerja FORCLIME periode 2021–2023, yakni mendukung program kerja Pokja REDD+ Papua, mendukung kegiatan dialog pusat-daerah terkait tema kebijakan kehutanan, pengembangan dan penguatan operasionalisasi KPH termasuk penyusunan/revisi RPHJP KPH dan taman nasional, pelatihan GIS dan pemetaan, perluasan program Perhutanan Sosial (untuk skema Hutan Adat), pengembangan KUPS, pemberdayaan masyarakat di desa pilot, penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, pelatihan gender dan kepemimpinan perempuan, serta komunikasi dan pengelolaan pengetahuan.

Sebagai tindak lanjut pertemuan ini, DKLH bekerja sama dengan seluruh mitra pembangunan kehutanan mengadakan pertemuan rutin mendiskusikan penyusunan pelaporan Penurunan Emisi Provinsi Papua.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
[Mohammad Sidiq](#), Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

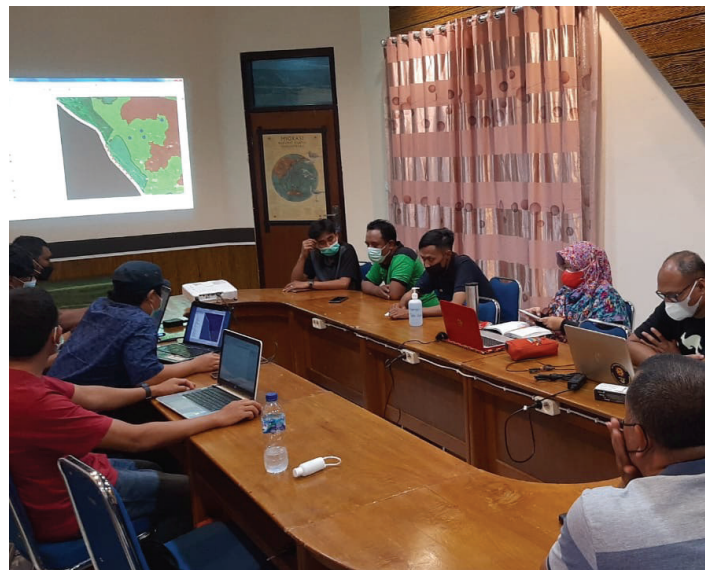
Program Kerja FORCLIME 4.0 terkait REDD+ dan Perlindungan Hutan							
Jenis Dukungan	Area (Program) Tematik						
	Penyiapan Kerangka Kebijakan	Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Perhutanan Sosial	Sustainable Livelihoods	Konservasi Keanekaragaman Hayati	Pengarusutamaan Gender	Pengembangan Jejaring Kerja dan Kesadaran Publik
Dukungan untuk Infrastruktur REDD+	Mendukung Program Kerja POKJA REDD+ Papua					Pelatihan Gender dan Kepemimpinan Perempuan	Komunikasi dan Pengelolaan Pengetahuan (Sosialisasi Kegiatan POKJA REDD+ Papua)
	Mendukung Kegiatan POKJA REDD+ dalam Dialog Pusat-Daerah (KLHK-Pemangku Kepentingan REDD+ Papua)						Mendukung POKJA REDD+ Papua dalam Kegiatan Study
Dukungan untuk Tata Kelola Hutan Berkelanjutan	Mendukung Kegiatan Dialog Pusat-Daerah (KLHK-Pemangku Kepentingan Daerah)	Penyusunan Revisi RPHJP KPH (Disesuaikan PP 23/2021 dan PermenLHK 8/2021)	Perluasan Program Perhutanan Sosial (untuk Skema Hutan Adat)	Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pilot (Usaha Produktif dan Jasa Lingkungan)		Pelatihan Gender dan Kepemimpinan Perempuan	
		Pengembangan dan Penguatan Operasionalisasi KPH	Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Usaha Produktif dan Jasa Lingkungan)		Penyusunan RPJP Taman Nasional dan Kawasan Konservasi		
		Pelatihan GIS dan Pemetaan			Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (METT)		

FORCLIME dukung Taman Nasional Wasur susun RPJP Periode 2021–2030: Kontribusi untuk implementasi kegiatan REDD+ Papua

Dalam rangka mendukung implementasi kegiatan REDD+ di Provinsi Papua, salah satu jenis dukungan adalah untuk tata kelola hutan berkelanjutan melalui konservasi keanekaragaman hayati. Salah satu ruang lingkup program kegiatan REDD+ di Provinsi Papua adalah konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem (perlindungan areal berhutan) pada salah satu Kawasan Pelestarian Alam di Provinsi Papua di Taman Nasional Wasur (TN Wasur). Kawasan yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zona yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

Pada tahun 2021, FORCLIME mendukung Tim Kerja Evaluasi RPJP Taman Nasional Wasur melalui beberapa rangkaian kegiatan, yakni lokakarya untuk mengevaluasi RPJP Balai TN Wasur periode 2014–2023 yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2021. Pertemuan berikutnya adalah mempresentasikan hasil evaluasi tersebut kepada Kepala Balai TN Wasur dan perwakilan Direktorat Kawasan Konservasi (Direktorat KK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang diselenggarakan pada tanggal 9 September 2021 di Kantor Balai TN Wasur, Merauke. Berdasarkan rangkaian kegiatan tersebut, hasil evaluasi menunjukkan perlunya penyusunan RPJP baru yang akan menjadi pedoman dan arahan pengelolaan TN Wasur untuk periode 2021–2030. Kepala Balai TN selanjutnya membentuk Tim Kerja Teknis Penyusunan RPJP TN Wasur periode 2021–2030, dan FORCLIME akan mendukung TN Wasur dalam penyusunan RPJP tersebut.

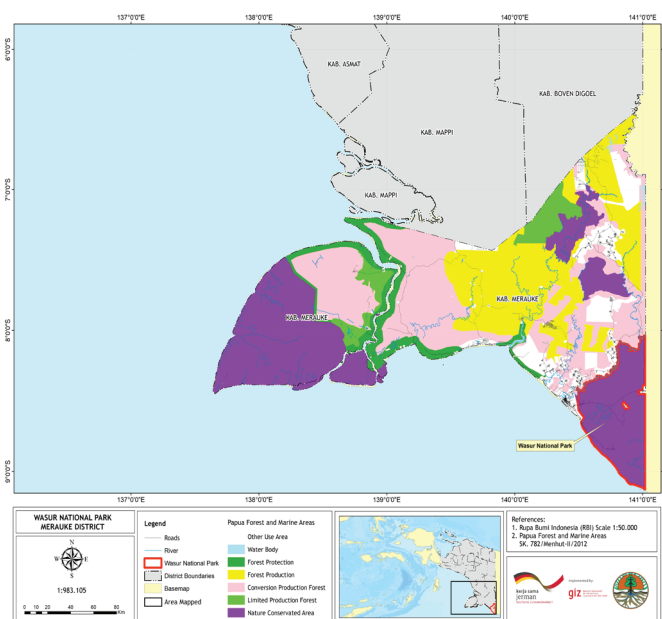
Pada bulan Oktober 2021 ini, Tim Kerja Teknis RPJP TN Wasur bersama tim ahli sudah mulai mengumpulkan data terkait kawasan, kajian keanekaragaman hayati, kajian aspek ekologi dan jasa ekosistem pada kawasan taman nasional,



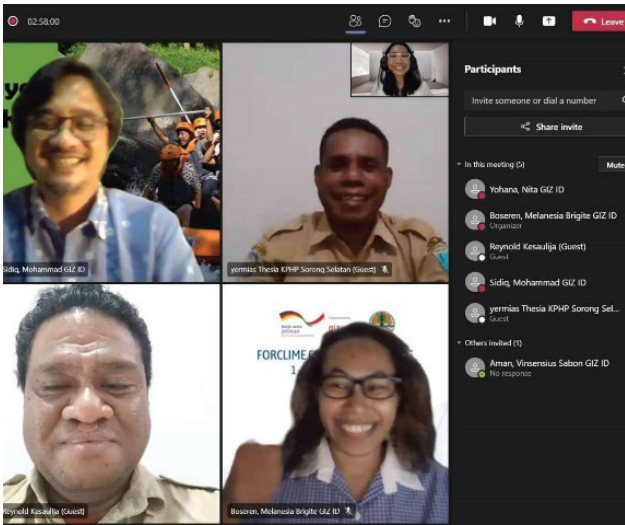
kajian sosial ekonomi dan budaya pada kampung-kampung adat yang berada di dalam dan di sekitar kawasan TN Wasur, dan melakukan kajian gender. Sebagai tindak lanjut dari pengumpulan data dan kegiatan studi di lapangan, pada bulan November–Desember 2021 Tim Kerja Teknis RPJP TN Wasur bekerja sama dengan FORCLIME dan beberapa tenaga ahli lokal akan menyelenggarakan serangkaian kegiatan untuk konsultasi publik, konsultasi kepada pemerintah daerah terhadap rancangan RPJP guna mendapatkan rekomendasi, dan pengajuan ke KLHK untuk pengesahan dokumen.



Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat



FORCLIME dan KPHP Sorong Selatan koordinasikan rencana kerja bersama



Untuk membangun sinergi pelaksanaan program kerja tahun 2021, FORCLIME dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Sorong Selatan mengadakan koordinasi pada tanggal 7 September 2021 melalui pertemuan daring. Kepala KPHP Sorong Selatan, Reynold Kesaulija S.Hut. M.Si., memaparkan tujuh program prioritas tahun 2021, yang dua diantaranya akan didukung oleh FORCLIME, yaitu:

- Pengembangan database dan informasi KPHP Sorong Selatan yang terintegrasi dengan pemeliharaan data spasial KPH;
- Proses redesign Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dan pelatihan GIS/data spasial bagi staf KPHP Sorong Selatan.

Dukungan akan diberikan dengan cara *filling the gap* bersama KPHP Sorong Selatan dan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, yakni mempertimbangkan kontribusi sumber daya dari masing-masing pihak.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai pemilihan desa binaan (*pilot village*) FORCLIME 4.0. Kepala KPHP Sorong Selatan merekomendasikan tiga Kampung di Distrik Sawiat, yaitu: Kampung Sasnek, Kampung Wendi, dan Kampung Lembah Hijau (Kampung Persiapan). Potensi unggulan dari kampung-kampung tersebut antara lain sarang semut (*Myrmecodia pendans*), nilam (*Pogostemon cablin* Benth), buah-buahan, dan jasa lingkungan/ekowisata. Saat ini belum ada pendampingan dari mitra kerja di kampung-kampung tersebut.

Kepala KPHP Sorong Selatan mengapresiasi komunikasi yang selama ini terjaga. "Pertemuan hari ini sangat baik sekali, terima kasih untuk teman-teman FORCLIME yang selalu ada untuk kami, walaupun kondisi pandemi, kita masih bisa terus berhubungan secara virtual", kata bapak Reynold Kesaulija, Kepala KPHP Sorong Selatan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

[Nita Yohana](#), Advisor bidang pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua Barat

[Melanesia Brigitte Boseran](#), Advisor Junior bidang penghidupan (livelihood) pedesaan, pengelolaan dan konservasi hutan

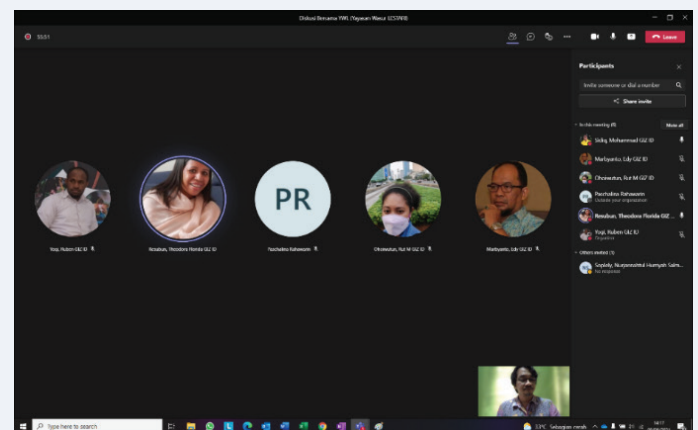
[Mohammad Sidiq](#), Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan koordinator Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

FORCLIME berkoordinasi dengan Yayasan Wasur Lestari identifikasi kampung percontohan di sekitar Taman Nasional Wasur, Papua

Untuk mendapatkan masukan dalam mengidentifikasi lokasi yang akan dijadikan kampung percontohan (*pilot*) pelaksanaan kegiatan, FORCLIME berkoordinasi dengan Yayasan Wasur Lestari pada tanggal 9 September 2021 melalui pertemuan daring. Yayasan Wasur Lestari telah berpengalaman melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar Taman Nasional Wasur. Yayasan Wasur Lestari merupakan mitra Balai Taman Nasional Wasur dalam memperkuat program pemberdayaan masyarakat di sekitar taman nasional. Pengetahuan dan pengalamannya, termasuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), dapat menjadi referensi dalam menetapkan kampung percontohan.

"Pendampingan masyarakat dalam mengembangkan HHBK sangat diperlukan sehingga dukungan semua pihak, termasuk FORCLIME, sangat dibutuhkan", kata Paschalina Rahwarin, Direktur Yayasan Wasur Lestari.

Taman Nasional Wasur berada di bagian tenggara Provinsi Papua, termasuk dalam Kabupaten Merauke. Taman nasional ini merupakan kawasan pelestarian alam dengan potensi keanekaragaman yang sangat tinggi, termasuk 403 species burung, 74 species diantaranya endemik Papua dan diperkirakan 114 species yang dilindungi.

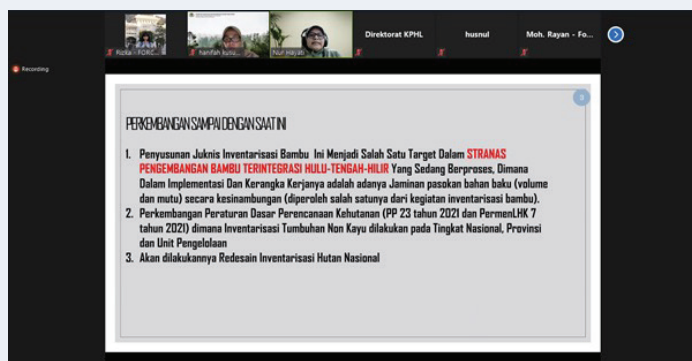


Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

[Theodora F. Resubun](#), Advisor pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua

[Mohammad Sidiq](#), Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Papua Barat

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan siapkan pedoman teknis inventarisasi bambu



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, mengadakan pertemuan untuk membahas dan meminta masukan terkait dengan draft Pedoman Teknis Inventarisasi Bambu untuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) pada 24 Agustus 2021. Rapat yang dilakukan baik secara daring maupun luring ini dipimpin oleh Kasubdit Inventarisasi Hutan, Direktorat IPSDH, Ir. Nurhayati, M.Si.

Penyusunan Petunjuk Teknis Inventarisasi Bambu merupakan salah satu target yang ditetapkan dalam Strategi Nasional Pengembangan Bambu Terpadu. Melalui penerapan strategi dan kerangka tersebut, diharapkan akan terjamin pasokan bahan baku yang berkelanjutan (baik dari segi volume maupun kualitas). Direktorat IPSDH, didukung oleh GIZ, telah menyusun pedoman teknis tersebut sejak 2019 dan telah melibatkan para pihak terkait lainnya untuk berpartisipasi dalam proses tersebut.

Hasil dari diskusi ini akan ditindaklanjuti dengan pertemuan lanjutan dengan Pusat Penelitian Kehutanan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang juga melibatkan para pihak terkait lainnya untuk meninjau lebih lanjut draft tersebut. Dokumen akhir pedoman teknis inventarisasi bambu ini diharapkan akan selesai pada akhir September 2021.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

[R. Rizka Dewi Zuleika](#), Advisor junior bidang pengelolaan hutan lestari

[Mohammad Rayan](#), Advisor teknis lintas bidang dan pengelolaan konflik

[Wandojo Siswanto](#), Manajer bidang strategis, kebijakan kehutanan dan perubahan iklim

Berkoordinasi dengan BBKSDA Manokwari pilih lokasi desa untuk program layanan kesehatan berbasis konservasi di Papua Barat



Dalam rangka mempersiapkan studi kelayakan [program pelayanan kesehatan berbasis konservasi](#) di Papua Barat, dilaksanakan rapat koordinasi secara daring antara FORCLIME, Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Manokwari dan Yayasan ASRI pada 27 Agustus 2021. Pertemuan tersebut bertujuan mendapatkan masukan dari BBKSDA terkait dengan desa percontohan untuk melakukan studi kelayakan, yang akan dilaksanakan selama empat bulan mulai dari Oktober 2021 hingga Januari 2022.

Dalam diskusi sebelumnya, Kabupaten Tambrauw telah dipilih sebagai lokasi pelaksanaan studi kelayakan. Salah satu penyebabnya adalah keberadaan cagar alam di kawasan tersebut, khususnya Pegunungan Tambrauw Utara dan Pegunungan Tambrauw Selatan, keduanya berada di bawah administrasi BBKSDA Manokwari. Mengingat bahwa rencana program yang akan dilaksanakan adalah untuk mengintegrasikan layanan kesehatan ke dalam upaya konservasi hutan, Kabupaten Tambrauw dianggap sebagai lokasi yang cocok untuk melaksanakannya.

Studi kelayakan ini akan melibatkan pelajar dari Universitas Papua yang mengikuti [program magang di FORCLIME](#), yang saat ini sedang dalam proses rekrutmen.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

[Melanesia Brigitte Boserren](#), Advisor Junior bidang penghidupan (livelihood) pedesaan, pengelolaan dan konservasi hutan

[Mohammad Sidiq](#), Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan koordinator Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

FORCLIME Kerja Sama Teknis (TC) adalah program yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan GIZ, dan didanai oleh Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ).

Alamat FORCLIME: Gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Blok 7 lantai 6. Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat 10270
T: +62 (0)21 572 0212, +62 (0)21 572 0214
www.forclime.org
Surel korespondensi: ratu.widyawati@giz.de